



**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI
JAWA TIMUR TAHUN 2015**

SKRIPSI

Oleh :

Rahmania Aulia Dewi

120810301154

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI
JAWA TIMUR TAHUN 2015**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Rahmania Aulia Dewi

120810301154

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta , Bapak Syamsul Hadi dan Ibu Umi Nadifah yang selalu memberikan dukungan tiada akhir, doa dan semangat yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan yang diberikan selama ini.
2. Suamiku tercinta Sura Aditya Dwi Putra dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.
3. Guru–guru dari TK hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya dan membimbing dengan sabar.
4. Dosen Pembimbing Saya Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. dan Ibu Septarina Prita D.S, S.E., M.SA., Ak.
5. Almater Tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang dapat benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

(R.A Kartini)

“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya”

(Alexander Pope)

“Allah Mencintai Pekerjaan yang Apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan Baik”

(HR. Thabrani)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmania Aulia Dewi

Nim : 120810301154

Judul skripsi : PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya sendiri bukan jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2017
Yang menyatakan

Rahmania Aulia Dewi
NIM 120810301154

SKRIPSI

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI
JAWA TIMUR TAHUN 2015**

Oleh
Rahmania Aulia Dewi
NIM 120810301154

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Andriana, S.E., M.Sc., Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Septarina Prita D.S, S.E., M.SA., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TIMUR 2015**

Nama Mahasiswa : Rahmania Aulia Dewi

N I M : 120810301154

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Tanggal Persetujuan : 24 Maret 2017

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II,

Andriana, S.E., M.Sc., Ak.
NIP 19820929 201012 2002

Septarina Prita D.S, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 19820912 2006042002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.
NIP.197809272001121002

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rahmania Aulia Dewi

NIM : 120810301154

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 197204162001121001

Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA, Ak. (.....)
NIP. 197705232008011012

Anggota : Aisa Tri Agustini, S.E., M.Sc. (.....)
NIP. 198808032014042002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Dekan,

Dr. Muhammad. Miqdad, S.E., M.M, Ak.
NIP. 197107271995121001

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Daerah di Jawa Timur Tahun 2015

Rahmania Aulia Dewi

jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersedia pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini juga menggunakan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengukur akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan tingkat kemandirian daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat sebagai proksi desentralisasi fiskal. Pada penelitian ini digunakan sampel 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2015. peneliti menghipotesiskan dan menemukan ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Kata Kunci: akuntabilitas, desentralisasi fiskal, opini audit, pemerintah daerah

*Effect Of Fiscal Desentralization Accountability Of Financial Reporting Local In
East Java 2015*

Rahmania Aulia Dewi

Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of fiscal decentralization on accountability of local government financial reporting in East Java. Data collection techniques in this study are secondary data in the form of Local Government Financial Report (LKPD) available at the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB). This study also uses the audit opinion of the Supreme Audit Agency (BPK) to measure the accountability of local government financial reporting. This study uses the level of regional independence and dependence on the central government as a proxy for fiscal decentralization. In this study used a sample of 38 districts / cities in East Java during the period 2015. Researchers hypothesize and find dependence on the central government negatively affect the accountability of local financial reporting.

Keywords: *accountability, fiscal decentralization, audit opinion, local government*

RINGKASAN

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah di Jawa Timur Tahun 2015; Rahmania Aulia Dewi, 120810301154; 2017; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Randa dan Paledung, 2013:55). Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat ini kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Arham, 2014:4). Oleh karena itu kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi perbedaan jarak pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Desentralisasi fiskal juga harus didukung dengan mekanisme *Good Public Governance* khususnya dalam konteks pemerintahan atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa tujuan penerapan *Good Governance* dalam sektor pemerintahan adalah meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kinerja publik dalam urusan pemerintahan (Kapucu, 2011:366). Salah satu mekanisme evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan adalah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (PP No. 6

Tahun 2008) yang menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber utama. LPPD memuat informasi tentang seluruh pelaksanaan tugas pemerintah baik urusan desentralisasi, tugas pembantuan maupun tugas umum pemerintahan (PP No.3 tahun 2007). LPPD harus disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat dijadikan sebagai mekanisme evaluasi tata kelola pemerintahan (PP No.3 tahun 2007).

Khususnya dari sisi pengelolaan dan pelaporan keuangan, Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.

. Pada penelitian ini obyek yang dipilih yakni provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan di Jawa Timur setiap tahunnya menyatakan bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2013 sampai saat ini lebih besar dibanding provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian analisis linier berganda bahwa Kemandirian Daerah tidak mempengaruhi tingkat Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah. Sedangkan ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah di Jawa Timur Tahun 2015”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Kustono, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Septarina Prita D.S, S.E., M.SA., Ak. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dukungan dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Orang Tua Saya Bapak Syamsul Hadi dan Ibu Umi Nadifah yang selalu memberikan doa dan dukungannya ;
6. Suami saya Sura Aditya Dwi Putra yang selalu memberi semangat dan motivasinya ;
7. Keluargaku Kak Fufu, Kak Aris, Mbak Wiwik, Sheeva, Mikayla serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terimakasih doa, nasihat, dukungan semangat dan moral sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan;
8. Sahabatku Iftinan Nada Davinda Afriadi, Amellia Putri Wulan Novita Sari, Nanda Puspasari, Iis Farida, Eva Vitasari, Luvita Mardiana yang selalu memberikan semangat;

9. Teman Seperjuangan Akuntansi 2012 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demikian Penyusunan skripsi ini sebagai laporan pertanggungjawaban penelitian dengan harapan hasil dan penelitian yang telah diperoleh bermanfaat bagi pembangunan pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para peneliti atau pihak yang terkait dalam mengembangkan penelitian, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. akhirnya penulis berharap, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember , 22 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Keagenan	9
2.2 Teori Sinyal	10
2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.4 Desentralisasi Fiskal	11
2.5 Reformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah	18
2.6 Pemeriksaan Keuangan Daerah	20

2.6.1	Definisi	20
2.6.2	Lingkup Pemeriksaan	20
2.7	Laporan Keuangan Daerah	23
2.7.1	Laporan Realisasi Anggaran	23
2.7.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	24
2.7.3	Laporan Operasional	24
2.7.4	Laporan Perubahan Ekuitas	25
2.7.5	Neraca	26
2.8.6	Laporan Arus Kas	26
2.8.7	Catatan Atas Laporan Keuangan	27
2.8	Penelitian Terdahulu	28
2.9	Pengembangan Hipotesis	29
2.8.1	Kerangka Konseptual	29
2.8.2	Tingkat Kemandirian Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	30
2.8.3	Ketergantungan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	31
BAB 3.	METODE PENELITIAN	32
3.1	Rancangan Penelitian	32
3.2	Populasi dan Sampel	32
3.2.1	Populasi	32
3.2.2	Sampel	32
3.3	Jenis dan Sumber Data	32
3.4	Identifikasi Variabel	33
3.5	Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel	33
3.5.1	Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>)	33
3.5.1	Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	33
3.6	Teknik Analisis Data	34
3.7	Metode Analisis Data	34
3.7.1	Uji Statistik Deskriptif	34
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	34

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda	36
3.7.4 Uji Hipotesis	37
3.8 Kerangka Pemecahan Masalah	39
BAB 4. PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum	40
4.2 Statistik Deskriptif	41
4.3 Uji Asumsi Klasik	42
4.3.1 Uji Normalitas	42
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	43
4.3.3 Uji Multikolinieritas	43
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	44
4.5 Uji Hipotesis	46
4.5.1 Uji F	46
4.5.2 Uji T	46
4.6 Pembahasan.....	48
4.6.1 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	48
4.6.2 Pengaruh Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	49
BAB 5. PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Keterbatasan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	30
Gambar 3.1	Kerangka Pemecahan Masalah	39

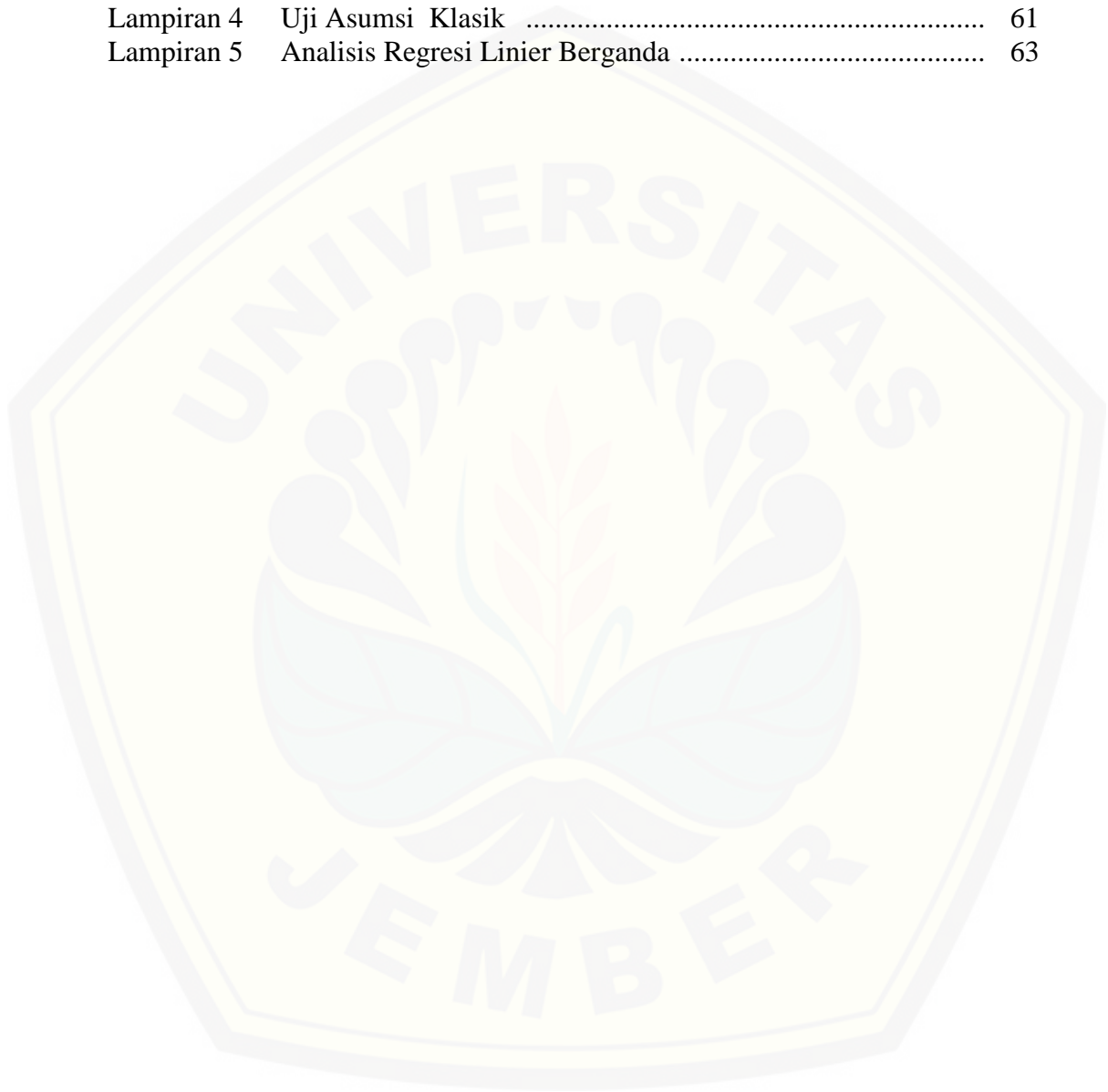


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Per Juni 2016	5
Tabel 2.1	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fsikal	13
Tabel 2.2	Kriteria Penilaian Tingkat Ketergantungan Daerah	17
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1	Jumlah Kecamatan dan Desa Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2016	40
Tabel 4.2	Hasil Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas	42
Tabel 4.4	Hasil Uji Glejser	43
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinieritas	44
Tabel 4.6	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	45
Tabel 4.7	Hasil Uji F	46
Tabel 4.8	Hasil Uji T	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Data APBD TA 2015	56
Lampiran 2	Data Variabel Penelitian	59
Lampiran 3	Statistik Deskriptif	60
Lampiran 4	Uji Asumsi Klasik	61
Lampiran 5	Analisis Regresi Linier Berganda	63



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Desentralisasi diartikan sebagai proses devolusi politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Transfer kekuasaan pada pemerintah lokal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem demokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menstimulasi pembentukan basis pengembangan ekonomi lokal dan nasional, meningkatkan transparansi pemerintahan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Moisiu, 2013:459). Jadi pengertian desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik dan harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proses desentralisasi ini meliputi 3 dimensi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal dan desentralisasi administratif (Kadafi, 2011:2). Desentralisasi juga merupakan cara untuk berpartisipasi masyarakat dan pemerintah lokal. Dan proses desentralisasi pertama berfokus pada politik dan kemudian aspek fiskal dan administratif (Colfer, 2006:134).

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum dipandang dari kewenangan pengeluaran yang mana daerah diberikan kebebasan mengambil keputusan sendiri untuk membelanjakan sumber fiskalnya melalui dukungan dana transfer (Fontanella *et all.*, 2013). Faktor-faktor yang menjadi pendorong desentralisasi di berbagai negara berkembang disebabkan oleh: pertama, tanda-tanda adanya disintegrasi bangsa, sehingga dengan desentralisasi sebagai jalan untuk mempersatukan negara. Padahal, pada prinsipnya pelimpahan wewenang yang dimaksud tidak hanya sekedar menjalankan delegasi pengeluaran fiskal dari pemerintah pusat semata akan tetapi kewenangan fiskal untuk memenuhi tuntutan kemandirian fiskal dalam kerangka otonomi daerah. Keputusan otonomi daerah sendiri inilah yang telah melahirkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya keuangan sebagai faktor pendukung penting dalam proses dan perjalanan otonomi daerah atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal (Kadafi, 2011:2).

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Randa dan Paledung, 2013:55). Desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintahan daerah. Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Arham, 2014:4). Oleh karena itu kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi perbedaan jarak pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Randa dan Paledung (2013:55) bahwa pemerintah pusat masih memiliki wewenang terkait dengan aspek-aspek penerimaan dan dalam pemberian wewenang itu sendiri harus meliputi kewenangan dalam mengelola keuangan.

Sehingga hal inilah yang kemudian memicu perilaku pemerintah terkait peningkatan kapasitas fiskal daerah. Menurut Aristovnik (2012:4), perilaku tersebut mengacu pada kualitas pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi desentralisasi fiskal saat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.

Implementasi desentralisasi fiskal di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih menyisakan sejumlah masalah seperti rendahnya kualitas pemerintahan dan tingginya tingkat pengangguran di sejumlah daerah di Jawa Timur dan selain itu karena sebagian besar penelitian terdahulu fokus hanya pada pada analisis keterkaitan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan atau desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintahan saja serta kualitas pemerintahan. Maka penulis tertarik untuk mengaitkan desentralisasi fiskal, kualitas pemerintahan secara simultan dengan unit analisis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dan kualitas pemerintah sendiri dapat dilihat dari kemandirian daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah dan ketergantungannya kepada pemerintah pusat yang dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah agar PAD dapat menjadi sumber keuangan terbesar.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan transfer kekuasaan dan wewenang pengelolaan beberapa urusan pemerintah pusat ke daerah mengharuskan reformasi pengelolaan pemerintah pada berbagai aspek termasuk pengelolaan keuangan daerah (Carnegie, 2005:905). Menurut Kadafi (2011:6) pada desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Moisiu, 2013:460). Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik

yang lebih baik dan menciptakan pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Kadafi, 2011:1). Namun pada beberapa negara justru ditemukan tingkat korupsi yang semakin tinggi pasca implementasi desentralisasi fiskal (Moisiu, 2013:460). Di Indonesia, desentralisasi fiskal justru meningkatkan kecenderungan korupsi di daerah (Rinaldi, *et all.*, 2007:53).

Desentralisasi fiskal juga harus didukung dengan mekanisme *Good Public Governance* khususnya dalam konteks pemerintahan atau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Beberapa tujuan penerapan *Good Governance* dalam sektor pemerintahan adalah meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kinerja publik dalam urusan pemerintahan (Kapucu, 2011:366). Salah satu mekanisme evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan adalah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (PP No. 6 Tahun 2008) yang menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber utama. LPPD memuat informasi tentang seluruh pelaksanaan tugas pemerintah baik urusan desentralisasi, tugas pembantuan maupun tugas umum pemerintahan (PP No.3 tahun 2007). LPPD harus disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat dijadikan sebagai mekanisme evaluasi tata kelola pemerintahan (PP No.3 tahun 2007).

Khususnya dari sisi pengelolaan dan pelaporan keuangan, Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian kerugian negara dan penanganan temuan pemeriksaan yang disampaikan kepada instansi berwenang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Tabel 1.1 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) Per 1 Juni 2016

No.	PEMDA	OPINI		
		2013	2014	2015
1	Provinsi Jawa Timur	WTP	WDP	WTP
2	Kabupaten Bangkalan	WTP	WDP	WDP
3	Kabupaten Banyuwangi	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Blitar	WDP	WDP	WDP
5	Kabupaten Bojonegoro	WDP	WTP	WTP
6	Kabupaten Bondowoso	WDP	WTP	WTP
7	Kabupaten Gresik	WDP	WDP	WTP
8	Kabupaten Jember	WDP	WDP	WTP

No.	PEMDA	OPINI		
		2013	2014	2015
9	Kabupaten Jombang	WTP	WTP	WTP
10	Kabupaten Kediri	WDP	WDP	WDP
11	Kabupaten Lamongan	WDP	WDP	WDP
12	Kabupaten Lumajang	WDP	WTP	WTP
13	Kabupaten Madiun	WTP	WTP	WTP
14	Kabupaten Magetan	WDP	WTP	WTP
15	Kabupaten Malang	WDP	WTP	WTP
16	Kabupaten Mojokerto	TW	WTP	WTP
17	Kabupaten Nganjuk	WTP	WTP	WTP
18	Kabupaten Ngawi	WTP	WTP	WTP
19	Kabupaten Pacitan	WTP	WTP	WTP
20	Kabupaten Pamekasan	WDP	WDP	WTP
21	Kabupaten Pasuruan	WTP	WTP	WTP
22	Kabupaten Ponorogo	WTP	WTP	WTP
23	Kabupaten Probolinggo	WTP	WTP	WTP
24	Kabupaten Sampang	WDP	WDP	WDP
25	Kabupaten Sidoarjo	WTP	WTP	WTP
26	Kabupaten Situbondo	WDP	WTP	WDP
27	Kabupaten Sumenep	WDP	WDP	WDP
28	Kabupaten Trenggalek	WDP	WDP	WDP
29	Kabupaten Tuban	WDP	WDP	WTP
30	Kabupaten Tulungagung	WTP	WTP	WTP
31	Kota Blitar	WTP	WTP	WTP
32	Kota Kediri	WDP	WTP	WTP
33	Kota Madiun	WDP	WTP	WTP
34	Kota Malang	WTP	WTP	WTP
35	Kota Mojokerto	WDP	WTP	WTP
36	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WDP
37	Kota Probolinggo	WTP	WDP	WDP
38	Kota Surabaya	WTP	WTP	WTP
39	Kota Batu	WDP	WDP	WTP
Jumlah		39	39	39

Sumber: BPK RI

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fontanella dan Rossieta (2012) tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Indonesia (2011-2012), menunjukkan bahwa

kemandirian daerah dan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Pada penelitian ini obyek yang dipilih yakni provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan di Jawa Timur setiap tahunnya menyatakan bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2013 sampai saat ini lebih besar dibanding provinsi lain di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini akan dilakukan pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk periode 2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis tertarik menulis judul skripsi dengan judul PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di Jawa Timur Tahun 2015?
2. Apakah Ketergantungan Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di Jawa Timur Tahun 2015?

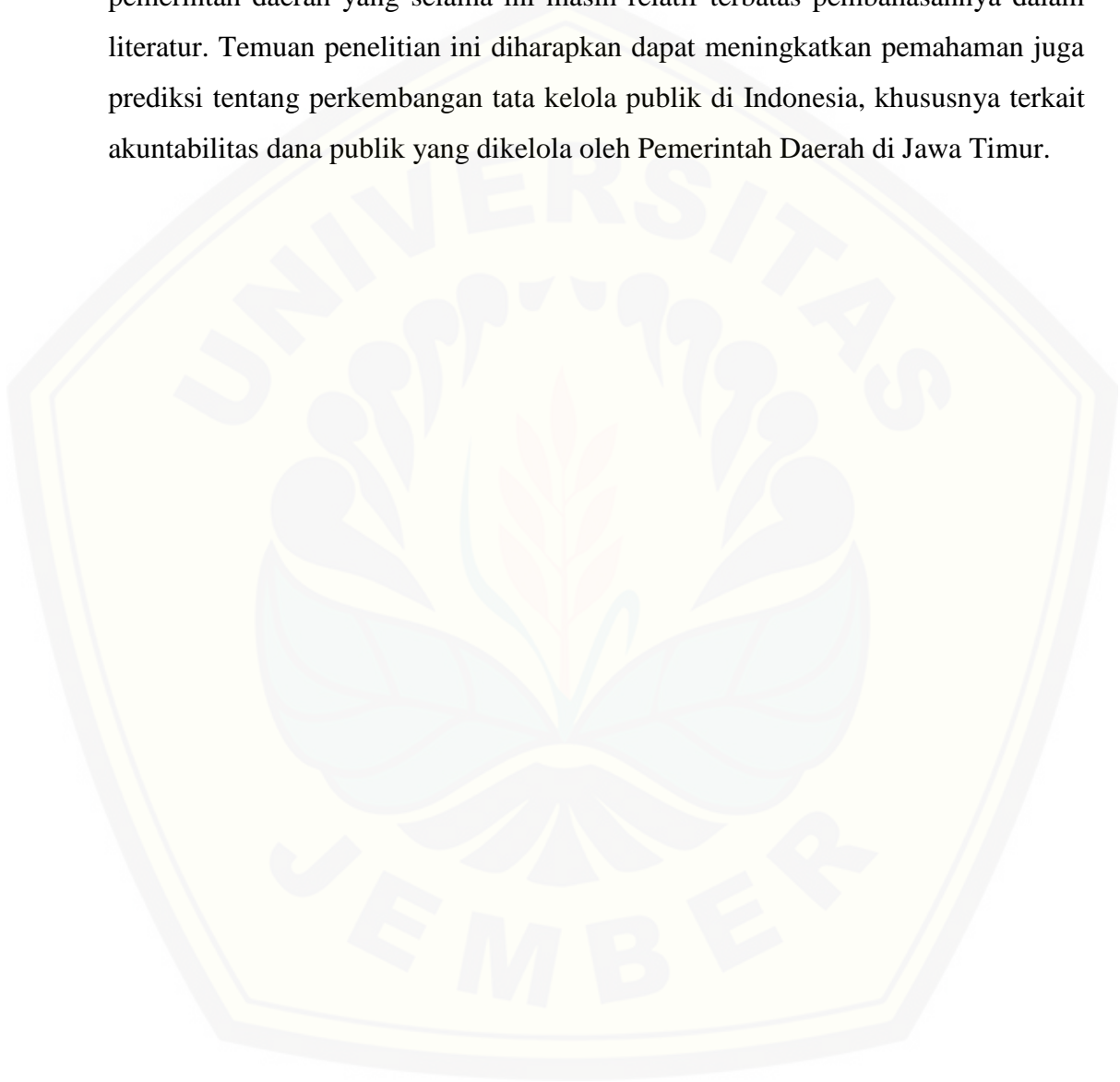
1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan Ketergantungan Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini masih relatif terbatas pembahasannya dalam literatur. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman juga prediksi tentang perkembangan tata kelola publik di Indonesia, khususnya terkait akuntabilitas dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Jawa Timur.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi antara manager dengan pemegang saham. Dan hubungan agensi dapat tercipta karena adanya kontrak antara *principal* (pemegang saham dan penyedia hutang) dengan *Agent* (manajer) untuk melakukan pelayanan kepada pemilik perusahaan (Godfrey 2010:362). Di dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran, muncul dua perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah *agent* dan legislatif adalah *principal*. Dalam hubungannya dengan rakyat, pihak legislatif adalah *agent* yang membela kepentingan rakyat (*principal*) (Halim dan Kusufi, 2012:202).

Konteks Teori agensi biasanya dianggap sebagai pihak yang memaksimalkan dirinya tetapi ia tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil (*outcome*) yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif tindakan yang dapat dilakukan agen. pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan demikian, perilaku manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan (Suwardjono, 2010:485).

Kajian teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk menjalani tugas roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah menjalankan tugasnya

dengan baik atau tidak kepada pemerintah pusat. Bila keputusan *agent* merugikan *principal* maka akan timbul masalah keagenan.

2.2 Teori Sinyal

Teori Sinyal (*signalling theory*) Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu daerah dan bagaimana pasaran efeknya. *Signalling Theory* menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa daerah juga telah beroperasi dengan baik. Pemerintah berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi daerah kepada investor sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan daerah. Teori sinyal menjelaskan mengapa daerah mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan daerah untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai daerah dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (khususnya investor dan kreditor) (Wolk, 2001:47).

Menurut Jogiyanto (2004:392) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Saat informasi diumumkan dan diterima pelaku pasar, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*). Pengumuman informasi akuntansi yang baik (*good news*) memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang, sehingga investor tertarik dan pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pelaksanaan analisis terhadap laporan keuangan diharapkan menjadivacuan bagi investor dalam

mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasinya, dengan kata lain informasi tersebut akan menyebabkan harga saham berfluktuasi.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2013:180) menyatakan bahwa setelah lima tahun mengupayakan berbagai usaha reformasi di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dimaksud, pada tahun 2003 dihasilkan satu paket perundangan-undangan yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang yang terkait dengan ketiga undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, kemudian menyusul seperti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan *bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).*

2.4 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah tata kelola yang baik yang ditandai dengan peningkatan efisiensi dan kesetaraan (*equity*), transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat; pembangunan yang berimbang dan berkelanjutan; pemberdayaan masyarakat serta penyerahan wewenang. Penyerahan wewenang itu sendiri bisa berupa yang pertama fungsional yaitu pengakuan adanya hak pada seseorang atau golongan untuk mengurus hal-hal tertentu di daerah; kedua yaitu kebudayaan berupa pengakuan adanya hak pada golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri di daerah; yang ketiga yaitu politik

berupa pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah tertentu. Sedangkan fiskal sendiri berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara (Colfer, 2006:100).

Desentralisasi diartikan sebagai proses politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Transfer kekuasaan pada pemerintah lokal ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem demokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menstimulasi pembentukan basis pengembangan ekonomi lokal dan nasional, meningkatkan transparansi pemerintahan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Moisiu, 2013:461). Jadi pengertian desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik dan harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proses desentralisasi ini meliputi 3 dimensi yaitu (Colfer, 2006:134):

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Mardiasmo (dalam Abimanyu, 2009) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan

instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan. Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Colfer, 2006:10). Menurut Bisma (2010 : 78) mengatakan bahwa :

“Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Desentralisasi fiskal jika dikaitkan dengan tujuan pengambilan keputusan menurut Syahrudin (dalam Fontanella dan Rossieta, 2013) dapat didefinisikan

dalam 3 cara yaitu : (i) pelepasan tanggungjawab dari pemerintah pusat ke daerah (dekonsentrasi); (ii) pendelegasian wewenang; dan (iii) pelimpahan wewenang (devolusi).

Prinsip Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman Negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi. Menurut Ter-minassian (1997:3) bahwa banyak Negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut Ter-minassian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut.

Menurut Mardiasmo (dalam Abimanyu, 2009) pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain;

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatkan sumber daya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Tidak jauh berbeda, (Makhfudz, 2002) tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk : 1) Mengurangi beban pemerintahan pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal. 2) Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari

kontribusi mereka itu. 3) Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. 4) Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*self government*). 5) Pembinaan kesatuan nasional.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2001:167) adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian daerah. Kemandirian daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Mahmudi (2016:140) Kemandirian daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Kemandirian daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016 :140)”.

b. Kemampuan Keuangan Daerah

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

“Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan” (Bisma, 2010:77).

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektivitas. Bisma (2010: 78) menuliskan tentang tujuan pengukuran efektivitas:

“Pengukuran tingkat efektivitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan”.

Sedangkan Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi. Mardiasmo (2004:133) mengatakan bahwa:

“Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi”.

2. Ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut Mahmudi (2016:140) Ketergantungan kepada pemerintah pusat yang dihitung dengan

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil. Menurut Bisma (2010: 78) mengatakan bahwa:

“Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”.

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah (Halim, 2001:259).

2.5 Reformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Di Indonesia, reformasi pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintahan telah melalui perjalanan panjang. Departemen Keuangan pada tahun 1979 – 1980 telah memulai sebuah rencana studi modernisasi sistem akuntansi pemerintahan. Pada saat itu sistem administrasi pemerintahan masih dilakukan secara manual dan pengelolaan keuangan negara didasarkan pada aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864 (*Indonesische Comptabiliteitswet*). Menurut Halim dan Kusufi (2012:304), ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan dalam pencatatan transaksi pemerintah daerah yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Dan pencatatan transaksi keuangan berupa pembukuan dilakukan dengan metode pencatatan tunggal (*single entry*). Dalam sistem *single entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali (Erlina *et all.*, 2015:4).

Reformasi penataan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi yang dilakukan pada aspek keuangan dilakukan secara bertahap melalui (Waris, 2012:7):

1. Reformasi perencanaan yaitu bergerak dari anggaran yang tradisional menuju anggaran yang berbasis kinerja. Penyusunan anggarannya pun dilakukan dengan jadwal yang pasti.
2. Reformasi Pelaksanaan yaitu bergerak menuju *single treasury account*.
3. Reformasi pencatatan keuangan yaitu dari sistem pembukuan *single entry* menuju *double entry*; dari *cash* basis menuju akrual basis.
4. Reformasi pelaporan yaitu dari hanya perhitungan anggaran menuju pada laporan keuangan yang terdiri dari 4 Jenis Laporan keuangan sebagaimana maksud pasal 31 UU 17 Tahun 2003 yang meliputi laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Momentum ini berlanjut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diikuti dengan lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. SAP yang termasuk didalam Peraturan Pemerintah No. 24

tahun 2005 menjadi landasan hukum kewajiban penyusunan laporan keuangan pemerintah. Saat ini PP No.24 tahun 2005 telah disempurnakan kedalam PP No.71 tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Erlina *et all.*, 2015:19).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada pemerintahan daerah sesuai dengan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 yang digunakan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai Sumber Daya Ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Erlina *et all.*, 2015:19).

2.6 Pemeriksaan Keuangan Daerah

2.6.1 Definisi

Secara yuridis, pasal 1 ayat 1 UU 15 Tahun 2004 Pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa (John, 2005:12).

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dokumen adalah data, catatan, dan keterangan yang

berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk atau corak apapun. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan perbaikan.

2.6.2 Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah (Trihartanto dan Barata, 2005:95).

Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan fungsi pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi, proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keandalan dan

akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Audit yang dilakukan oleh BPK berfungsi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi pemerintah (SAP). Berdasarkan Undang-Undang Pasal 16 No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara, opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan proses pemeriksaan BPK tidak hanya memberikan opini atas laporan keuangan tersebut, tetapi juga melaporkan hasil pemeriksaan, baik terhadap sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK memberikan empat jenis opini audit yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini yang menjelaskan bahwa laporan keuangan telah diungkapkan secara wajar dengan standar yang mengaturnya disertai bukti-bukti yang mendukung dan sah dan meyakinkan dalam pengambilan keputusan (Suswinarno, 2012:102).

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Auditor dalam keadaan tertentu menambahkan suatu paragraf penjelas (atau paragraf penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.

- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
 - d. Penekanan atas suatu hal
 - e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)
- Opini Wajar Dengan Pengecualian merupakan hasil penelitian auditor setelah mengaudit laporan keuangan serta semua dokumen pendukungnya, bahwa semua saldo angka yang tercantum dalam laporan keuangan adalah wajar kecuali satu atau dua rekening yang membutuhkan penjelasan tambahan, yang nilainya tidak signifikan (Suswinarno, 2012:102).
4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
- Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan sesuai standar yang mengaturnya, sistem dan prosedur pencatatan akuntansinya tidak konsisten. Dengan demikian, auditor tidak dapat meyakini setiap saldo rekening dalam laporan keuangan (Suswinarno, 2012:103). Dan menurut Aritonang (2009:89) penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski ada koreksi yang telah diajukan oleh auditor dalam pemeriksaan.
5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)
- Opini tidak memberikan pendapat bukan berarti auditor menolak melakukan penugasan auditor. Pendapat auditor ini diberikan setelah auditor melakukan audit terhadap *auditee*. Hasil auditnya tidak terdapat sistem dan prosedurnya akuntansi yang baku. Selain itu adanya pembatasan ruang lingkup oleh yang diperiksa dan pembatasan ini sangat penting, sedang auditor tidak dapat melakukan pengujian lain (Aritonang, 2009:89). Dengan demikian, auditor tidak hanya tidak dapat meyakini setiap saldo rekening dalam laporan keuangan, tetapi secara lebih tegas auditor meyakini secara sah dan meyakinkan bahwa setiap rekening dalam laporan keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan (Suswinarno, 2012:103).

2.7 Laporan Keuangan Daerah

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelolah Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari:

2.7.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan, yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (Bastian, 2005:139). Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Erlina *et all.*, 2015:23).

2.7.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Menurut Peraturan Menteri keuangan nomer: 206/TMK.05/2010 tentang pengelolaan saldo anggaran lebih, Laporan perubahan saldo anggaran lebih berasal dari saldo anggaran lebih yang digunakan dalam rangka membiayai defisit APBN tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 63 dinyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya (Aliyah, 2012). Sementara PSAP No. 1 Paragraf 41 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo anggaran lebih awal.
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih.

- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
- e. Lain-lain
- f. Saldo anggaran lebih akhir (Erlina *et al.*, 2015:48)

2.7.3 Laporan Operasional (LO)

Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sehingga, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klarifikasi ekonomi atau klarifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Aliyah, 2012). Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rajin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan (Erlina *et al.*, 2015:78).

2.7.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan PSAP No. 1 Paragraf 101 dan 102 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.

- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya.
- d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. (Erlina *et all.*, 2015:85). Laporan perubahan ekuitas dalam versi sebelum PSAK -1 tidak dianjurkan, hanya menyangkut perubahan saldo laba di laporan perhitungan laba rugi dan saldo laba (Marom, 2001:15).

2.7.5 Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan modal pemilik pada saat tertentu (Bastian, 2005:247). Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan entitas. Dan pada PSAP No. 1 Paragraf 45 dan 46 dikatakan bahwa setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan (Erlina *et all.*, 2015:49).

2.7.6 Laporan Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya (Bastian, 2005:140). Kerangka konseptual PP No. 71

Tahun 2010 Paragraf 80-81 menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari:

- a. Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kkas yang keluar dari bendahara umum negara/ daerah.

Tujuan pelaporan arus kas menurut PSAP No. 3 Paragraf 2 adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan (Erlina *et all.*, 2015:86).

2.7.7 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca lebih luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu (Bastian, 2005:140). Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CALK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Stadar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian lapora keuangan secara wajar. Dan juga dijelaskan dalam PSAP No. 4 Paragraf 8-11 bahwa setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan. Serta memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah,

sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis (Erlina *et al.*, 2015:99).

2.8 Penelitian terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

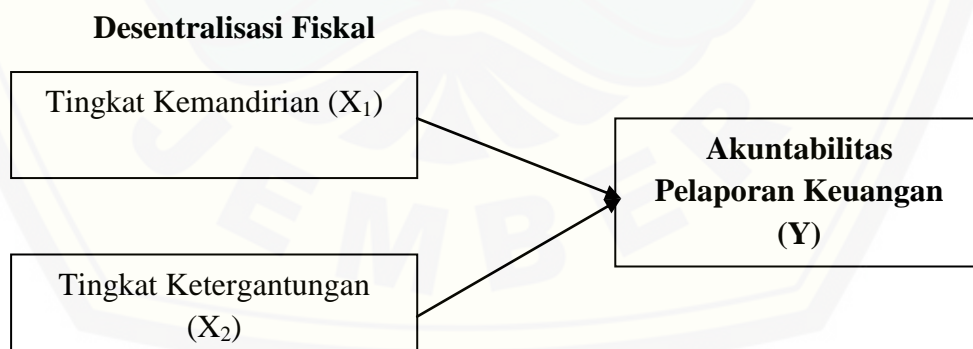
No	Judul	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia (Fontanella dan Rossieta,2012)	1. Akuntabilitas. 2. Desentralisasi fiskal a. Kemandirian Daerah b. Ketergantungan pada pemerintah pusat 3. Kinerja	Peneliti menghipotesiskan dan menemukan Kemandirian daerah, Ketergantungan pada pemerintah pusat dan kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyajian Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Fitriyah,2013)	1. Kompetensi SDM 2. Penyajian Laporan Keuangan 3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Peneliti menghipotesiskan dan menemukan Kompetensi SDM dan Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
3	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas	1. Akuntabilitas. 2. Desentralisasi fiskal a. Kemandirian	Peneliti menghipotesiskan dan menemukan Kemandirian Daerah dan Ketergantungan pada pemerintah pusat

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja(2011-2012) (Mudhofar dan Tahar, 2016)	Daerah b. Ketergantungan pada pemerintah pusat 3. Kinerja	berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
--	---	--

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini digunakan secara sistematis untuk membantu menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menjadikan Desentralisasi Fiskal berupa Kemandirian Daerah (X_1) dan Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat (X_2) sebagai variabel bebas akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y). Berikut gambar kerangka konseptual dalam penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9.2 Tingkat Kemandirian terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Megantara (2009:561) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi

rakyat dalam tataran pemerintahan. Sementara itu, desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administratif melalui pemberian kewenangan di bidang keuangan

Literatur terdahulu dapat dijadikan sebagai bukti empiris bahwa kemandirian pendanaan melalui desentralisasi fiskal berdampak terhadap akuntabilitas keuangan. Namun disisi lain jika dihubungkan dengan korupsi, literatur menunjukkan hasil yang masih *mixed*. Beberapa literatur mengungkapkan desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan mengurangi tingkat korupsi. Namun disisi lain literatur menyebutkan desentralisasi fiskal justru mendorong pemindahan korupsi dari level pemerintah pusat ke daerah (Moisiu, 2013:463).

Kemandirian pendanaan melalui desentralisasi fiskal dapat juga berdampak terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga konsisten dengan yang terjadi di Indonesia dimana Rinaldi (2007:53) menemukan desentralisasi fiskal justru meningkatkan korupsi, bukan meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris terkait desentralisasi fiskal dan akuntabilitas pelaporan keuangan, maka Hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1 : *Tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan.*

2.9.3 Tingkat Ketergantungan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Halim (2001:272) menjelaskan ciri utama sebuah daerah telah melaksanakan desentralisasi secara baik adalah daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Idealnya dengan desentralisasi fiskal yang dilengkapi dengan seperangkat aturan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan daerah yang memadai maka kemandirian pendanaan

daerah melalui desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan manfaat ekonomis bagi suatu negara. Menurut Syahrudin (dalam Fontanella dan Rossieta, 2013) menemukan bahwa desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Besar kemungkinan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Hadi (2009:106) di Indonesia, desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal meningkatkan kualitas pelayanan publik, desentralisasi fiskal juga menghasilkan penyediaan *public goods* sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Hadi, 2009:106). Dengan demikian, Hipotesis kedua yang diajukan adalah :

H2 : *Tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat berpengaruh Terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan*

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Bambang, 2014:130). Desain penelitian harus sesuai dengan metode yang dipilih. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013:2). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur Tahun 2015.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Indriantoro dan Bambang (2014: 115) populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel yaitu sebagian dari elemen-elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jawa Timur tahun 2015 sebanyak 38 Kabupaten/Kota.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:5), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Dalam penelitian ini penarikan sampel berdasarkan *purposive sampling* yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten/Kota.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tersedia pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2015.

3.4 Identifikasi Variabel

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:63), Tipe-tipe variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel, yaitu: Variabel bebas (*Independen Variable*), Variabel terikat (*Dependen Variable*). Variabel Terikat (*Dependen Variable*) dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan keuangan. Sedangkan variabel bebas (*Independen Variable*) dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal.

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

3.5.1 Definisi Operasional Variabel Terikat (*Dependen Variable*)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Indriantoro dan Supomo, 2014:64). Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah dalam penelitian menggunakan proksi opini audit yang dikeluarkan oleh BPK. Opini audit dalam penelitian ini akan diukur dengan skala ordinal yang menunjukkan tingkatan atau peringkat mulai dari opini paling rendah sampai yang paling tinggi yang mengacu pada penelitian Fontanella dan Rossieta (2012) , sebagai berikut :

- 1=Tidak Menyatakan Pendapat (TMP),
- 2=Tidak Wajar (TW),
- 3=Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
- 4=Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP),
- 5=Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.5.2 Variabel Bebas (*Independen Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat) (Indriantoro dan Supomo, 2014:65). Desentralisasi fiskal diukur dengan dua proksi, yaitu; (i) tingkat kemandirian daerah; dan (ii) tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis seberapa besar persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud realita kemandirian keuangan pemerintah daerah

dalam membiayai pembangunan dan melayani masyarakat di daerahnya. Maka acuan yang digunakan sebagai kajian analisis adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audit BPK RI), terutama Laporan Realisasi APBD (LRA). Dengan demikian untuk menganalisis LRA pemerintah daerah, akan menggunakan rasio-rasio yang menunjukkan dimensi kemandirian keuangan pemerintah daerah, sebagai mana menurut Irwan Taufiq Ritonga (2013) dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” adalah sebagai berikut:

- a. Kemandirian Daerah dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Kemandirian Daerah} = \text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} / \text{Total Pendapatan}$

- b. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Ketergantungan pada Pemerintah Pusat} = \text{DAU} + \text{DAK} / \text{Total Pendapatan.}$

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Uji Statistkik Deskriptif

Menurut Alfiani (2013), Sebelum variabel penelitian dianalisis dengan pengujian rumus statistik, data dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan terlebih dahulu agar memberi gambaran mengenai variabelnya. Baik variabel terikat (Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah), maupun variabel bebas (Desentralisasi fiskal).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang *signifikan* dan *representative*, maka model yang digunakan tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Dengan pengujian ini diharapkan agar model regresi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bias disebut BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*) maka asumsi–asumsi dasar berikut ini harus dipenuhi:

- a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas ini adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji ini berguna untuk tahap awal dalam metode pemelihan analisis data. Jika data

normal, maka digunakan *statistic parametric*, dan jika data tidak normal, maka digunakan *statistic nonparametric* atau lakukan treatment agar data normal. Ghozali (2013:160) mengemukakan cara untuk medeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak ada dua, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik dengan melihat histogram dari residualnya”. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mangikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan data berdistribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (K – S) untuk menguji normalitas data. Uji K- S dibuat dengan membuat hipotesis:

Ho: data residual berdistribusi normal,

Ha: data residual tidak berdistribusi normal

Bila signifikansi $> 0,05$ dengan $\alpha = 5\%$ berarti distribusi data normal dan Ho diterima, sebaliknya bila nilai signifikansi $< 0,05$ berarti distribusi data tidak normal dan Ha diterima. Data yang tidak terdistribusi secara tidak normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Jika data tidak normal ada beberapa cara mengubah model regresi menjadi normal menurut Jogiyanto (2004: 172), yaitu:

1. Dengan melakukan transformasi data ke bentuk lain, yaitu: Logaritma Natural, akar kuadrat, Logaritma Lo,
2. Melakukan *trimming*, yaitu dengan mengubah observasi yang bersifat outlier,
3. Melakukan *winsorizing*, yaitu mengubah nilai – nilai data outlier menjadi nilai – nilai minimum atau maksimum yang diizinkan supaya distribusinya menjadi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berarti varians dalam model tidak sama, sehingga estimator yang diperoleh tidak efisien. Hal tersebut disebabkan varians yang tidak minimum. Uji *Glejser* dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Menurut Prayitno (2010:93), pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap seluruh variabel bebas. Apabila hasil regresi absolute terdapat seluruh variabel bebas mempunyai nilai signifikan diatas 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model penelitian lolos dari adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak, model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel – variabel ini tidak orthogonal (nilai korelasi tidak sama dengan nol). Uji multikolonieritas ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Nilai yang biasanya umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* antara 0 – 1 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013:105).

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode ini untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel dependen terhadap variabel independen menggunakan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier. Adapun dari hipotesis yang diterima apabila angka signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak, dan jika angka > 0.05 maka H_0 diterima (Ghozali, 2013:61). Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah

a : Konstanta

b₁-b₂ : Koefisien Regresi variabel independen

- X1 : Kemandirian Daerah
X2 : Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
e : variabel pengganggu

3.7.4 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah, untuk itu perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui kebenarannya dengan menggunakan uji hipotesis.

a. Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau belum dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95% (Ghozali, 2013:84).

b. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2013:99) Uji t dilakukan untuk menguji variabel bebas secara terpisah mampu menjelaskan variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficient* pada kolom *significance*. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Perumusan Hipotesis

- Ho : $u = 0$, tidak ada pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah .
Ha : $u \neq 0$, ada pengaruh antara desentralisasi fiskal terhadap Akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Taraf nyata yang digunakan adalah 5% hasil pengujiannya:

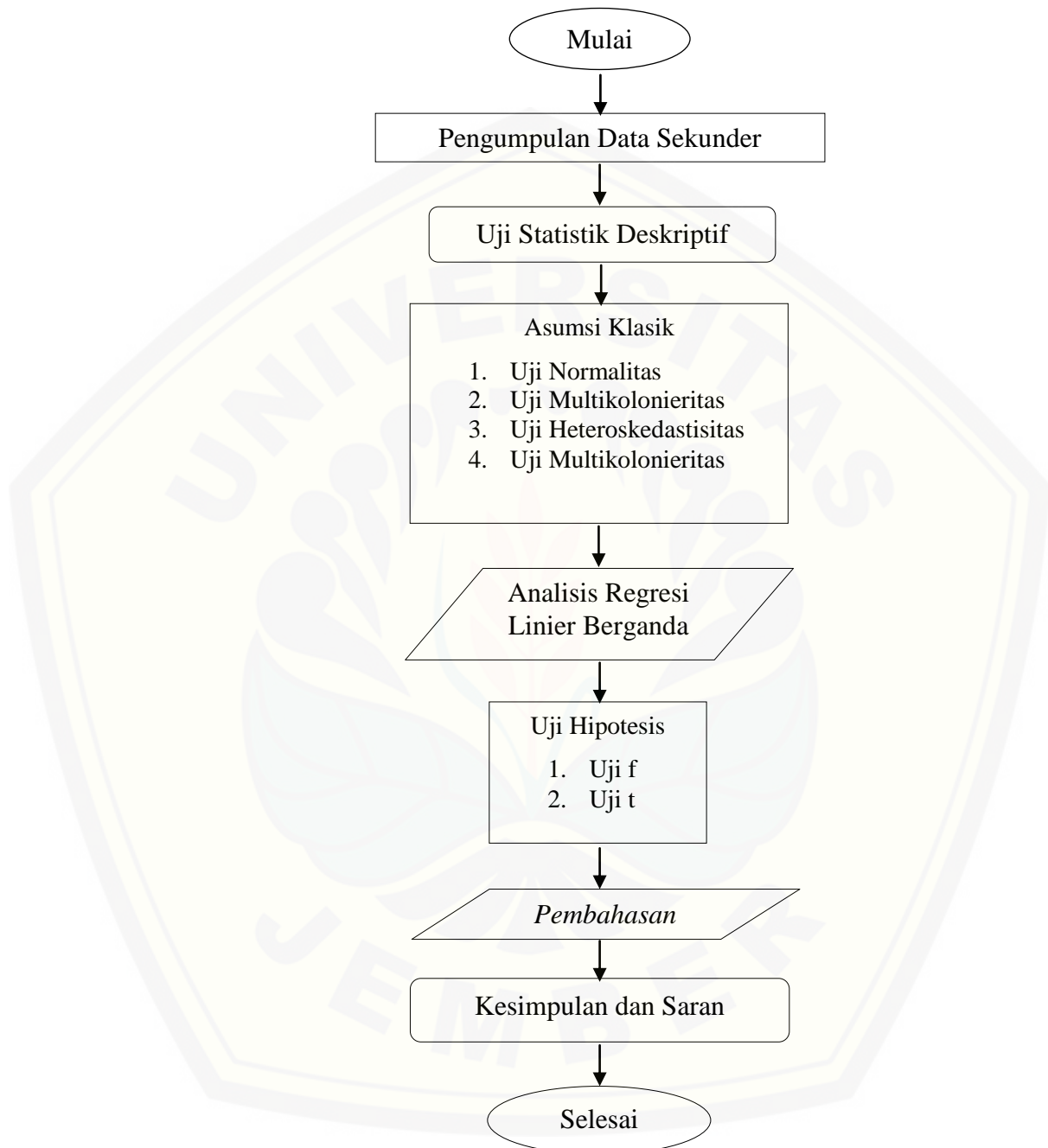
1) $\text{Sig} < (0,05)$, maka Ho ditolak.

Artinya: variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat.

2) $\text{Sig} > (0,05)$ Maka Ho diterima.

Artinya: variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat.

3.8 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa Kemandirian Daerah belum tentu mampu mempengaruhi tingkat Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah di Jawa Timur.
2. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi ketergantungan pada Pemerintah Pusat akan menurunkan tingkat Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah di Jawa Timur.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel independen Kemandirian Daerah, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah.
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah dengan rentang tahun 2015.

5.3 Saran

1. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian berikutnya bisa menambahkan variabel lain seperti karakteristik laporan keuangan, transparansi publik dan kebijakan publik terkait dengan variabel yang berpotensi mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun observasi menggunakan rentang tahun yang paling baru, sehingga dapat lebih mengetahui Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Procedding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Arham, M.A. 2014. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektor, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*. Vol 14 (2): 4.
- Aristovnik, A. 2012. *Fiscal Decentralization in Eastern Europe: Trends and Selected Issues*. Vol 37 (5): 12.
- Aritonang, B. 2009. *Orang Batak Memandang BPK*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Aliyah, S. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Tesis*. Jepara: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama.
- Bahl, R. 1999. *Implementation Rules For Fiscal Decentralization*.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.
- BPK.2013. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012.Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Colfer, C. J. P., dan Capistrano, D. 2006. *Politik Desentralisasi: Hutan dan Keasaan Rakyat*. Bogor: CIFOR.
- Fontanell dan Rossieta. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Godfrey, Jayne, Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton dan Scott Holmes. 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. John Wiley.
- Gozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Variabel SPSS, cetakan keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, A. 2013. *Managemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi 2004/2005. Cetakan Pertama. BPFE:Yogyakarta.
- John, M. Y & Setiawan D. 2005. *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kadafi, M. 2011. *Ada Apa Dengan Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Vol 7 (2):17.
- Kapucu, N. 2009. *New Public Management and Governance Perspectives in Understanding Public Management, Public Administration Review*. Vol 3 (4): 366-375.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2013. *Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2011 Tingkat Nasional*.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2014. *Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2012 Tingkat Nasional*.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Makhfudz, M. 2002. *Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah*. *Jurnal Hukum*. Vol 3(2):11-13.
- Mandell, Lee M. 1997. *Performance Measurements and Management Tools in North Carolina Local Government*. *Public Administration Quarterly*; Spring 1997; Vol. 21: 96.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 'Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008' dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie. *Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2009.
- Marom, C. 2001. *Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Misra, F. 2008. *Investigasi dan Analisis Empiris Praktek Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah*

Istimewa Yogyakarta da Jawa Tengah). Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Moisiu, A. 2013. *Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments*. Procedia-Social and Behavioral Sciences. pp.459-463.

Peraturan Menteri Keuangan Nomer: 206/TMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.

Randa, F. & Paledung, S. 2013. *Memahami Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Fenomenologi pada Kabupaten Poso*. Vol 11 (1): 55.

- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti. 2007. *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi : Studi Kasus Penangana Korupsi Pemerintahan Daerah, Bank Dunia L Justice for the poor Project*. Vol 8 (3): 53.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah, Pustaka Pelajar
- Sasana, Hadi. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni, 2009, hal. 103 – 124.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Tesis*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Suswinarno, Ak., MM. 2012. *Aman Dari Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif* Edisi Ketiga. BPFE: Yogyakarta.
- Terminassian, T. 1997. *Fiscal Federalism in Theory and Practice*. Washington: International Monetary Fund.
- Trihartanto, B & Barata, A.A. 2005. *Perbendaharaan dan pemeriksaan keuangan negara/daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Waris, I. 2012. *Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ilmu Publik. Vol. 3(1): 7-8.
- Wolk, et all (2001). .” *Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choice*”. *Accounting and Business Research*. Vol. 18. No 69:47-56

Lampiran 1. Data APBD TA 2015

Uraian	Prov. Jawa Timur	Kab. Bangkalan	Kab. Banyuwangi	Kab. Blitar	Kab. Bojonegoro	Kab. Bondowoso	Kab. Gresik	Kab. Jember	Kab. Jombang	Kab. Kediri	Kab. Lamongan	Kab. Lumajang
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pendapatan	22.863.538	1.614.127	2.394.403	1.957.873	2.946.124	1.577.181	2.484.678	3.033.788	1.893.060	2.129.356	2.107.101	1.667.403
PAD	14.771.139	122.079	249.037	176.939	262.952	122.174	842.197	508.051	256.126	272.923	266.767	170.243
Pajak daerah	12.591.000	24.362	77.072	43.783	61.130	17.126	410.456	129.850	54.500	115.603	68.572	31.735
Retribusi daerah	136.337	16.780	23.972	19.207	30.022	16.475	228.947	39.086	31.378	20.071	24.002	25.546
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	351.345	1.505	15.464	2.488	19.993	3.400	26.627	7.143	3.084	7.702	20.876	4.359
Lain-lain PAD yang sah	1.692.457	79.432	132.529	111.461	151.807	85.173	176.168	331.972	167.163	129.547	153.317	108.602
Dana Perimbangan	4.345.684	1.137.834	1.469.637	1.231.046	2.144.453	1.001.041	1.131.469	1.863.100	1.184.406	1.319.841	1.259.978	1.118.111
DBH	2.692.383	145.652	129.135	119.487	1.229.419	50.730	214.231	188.088	118.962	89.404	155.503	124.745
DAU	1.587.262	888.673	1.288.941	1.037.911	895.987	862.600	873.266	1.586.837	1.032.325	1.177.392	1.064.301	923.492
DAK	66.039	103.509	51.561	73.648	19.047	87.711	43.972	88.175	33.119	53.045	40.174	69.873
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.746.714	354.214	675.729	549.888	538.719	453.966	511.013	662.637	452.528	536.591	580.356	379.049
Hibah	45.141	1.579	131.226			2.386	1.247	3.146	1.276			
Dana darurat	-											
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Penda lainnya	-	70.148	123.164	103.349	103.172	40.242	190.021	156.527	79.798	127.576	104.383	81.361
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	3.701.573	265.240	420.989	368.403	376.770	240.829	301.624	502.925	325.946	408.955	362.077	290.390
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Penda lainnya		17.084		78.136	58.777	170.510	18.122		45.409	60	113.848	7.298
Lain-lain		164	350					40	100		48	
Belanja	23.720.920	1.771.841	2.572.287	2.065.949	2.985.670	1.609.754	2.565.135	3.129.288	2.097.689	2.357.483	2.196.879	1.893.959
Belanja Tidak Langsung	15.405.542	992.866	1.569.064	1.394.374	1.569.557	987.460	1.364.149	1.899.256	1.268.373	1.586.708	1.447.365	1.160.180
Belanja Pegawai	2.172.655	835.937	1.303.108	1.173.662	1.200.099	826.174	895.248	1.499.100	1.016.404	1.233.764	1.071.416	890.265
Belanja Bunga	2.829	6.356								50		
Belanja Subsidi					307							
Belanja Hibah	5.270.777	23.570	148.775	54.054	39.290	16.586	148.428	206.112	45.934	74.827	122.069	79.232
Belanja Bantuan sosial	7.010	200	12.694	2.675	8.661	7.280	21.855	46.278	2.780	15.246	11.993	22.742
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	5.020.519	2.000	3.168	9.711	10.529		41.541	887		16.186	3.393	609
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	2.856.753	122.644	96.319	149.772	299.913	136.350	255.077	141.879	202.255	240.136	234.549	164.803
Belanja tidak terduga	75.000	2.158	5.000	4.500	10.758	1.070	2.000	5.000	1.000	6.500	3.944	2.530
Belanja Langsung	8.315.378	778.976	1.003.224	671.575	1.416.113	622.294	1.200.986	1.230.032	829.316	770.775	749.514	733.780
Belanja Pegawai	779.474	139.760	88.687	21.808	161.656	22.608	97.903	112.313	51.347	41.575	34.692	79.341
Belanja Barang dan jasa	4.969.939	230.354	463.987	285.361	630.924	281.216	510.304	573.545	400.145	275.126	393.514	315.065
Belanja Modal	2.565.964	408.862	450.550	364.406	623.532	318.470	592.779	544.174	377.825	454.074	321.308	339.373
Pembiayaan Netto	857.382	157.714	177.884	81.364	39.546	32.574	80.457	95.500	204.629	228.127	53.940	226.556
Penerimaan Pembiayaan	1.193.115	166.876	177.884	81.364	248.946	34.074	80.457	95.863	210.129	329.327	79.340	230.556
SILPA TA sebelumnya	1.193.115	90.957	177.884	70.775	225.831	34.074	80.457	95.863	209.979	298.127	56.940	229.431
Pencairan dana cadangan				10.000						31.000		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.222		590								
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		70.181			23.115							
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		517							150	200	22.400	1.125
Pengeluaran Pembiayaan	335.733	9.163	-	-	209.400	1.500	-	363	5.500	101.200	25.400	4.000
Pembentukan Dana Cadangan	100.000	500								100.000		
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	225.000	8.663			209.400	1.500			5.500	1.000	25.400	
Pembayaran Pokok Utang	10.733									200		1.765
Pemberian Pinjaman Daerah												2.235
Pembayaran Kegiatan Lanjutan												
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga								363				

Lampiran 2. Data Variabel Penelitian

No.	Kab/Kota	PAD	Pdp Trf	Lain-lain	Total Pdp	Kemandirian	Ketergantungan	Opini
		[A]	[B]	[C]	[D]	[A/D*100%]	[B/D*100%]	Audit
1	Kab. Bangkalan	122.079	1.137.834	354.214	1.614.127	7,5632	70,4922	3
2	Kab. Banyuwangi	249.037	1.469.637	675.729	2.394.403	10,4008	61,3780	5
3	Kab. Blitar	176.939	1.231.046	549.888	1.957.873	9,0373	62,8767	3
4	Kab. Bojonegoro	262.952	2.144.453	538.719	2.946.124	8,9253	72,7890	5
5	Kab. Bondowoso	122.174	1.001.041	453.966	1.577.181	7,7463	63,4703	5
6	Kab. Gresik	842.197	1.131.469	511.013	2.484.678	33,8956	45,5378	5
7	Kab. Jember	508.051	1.863.100	662.637	3.033.788	16,7464	61,4117	5
8	Kab. Jombang	256.126	1.184.406	452.528	1.893.060	13,5297	62,5657	5
9	Kab. Kediri	272.923	1.319.841	536.591	2.129.356	12,8172	61,9831	3
10	Kab. Lamongan	266.767	1.259.978	580.356	2.107.101	12,6604	59,7968	3
11	Kab. Lumajang	170.243	1.118.111	379.049	1.667.403	10,2101	67,0570	5
12	Kab. Madiun	128.676	971.081	419.727	1.519.484	8,4684	63,9086	5
13	Kab. Magetan	122.840	988.003	396.939	1.507.782	8,1470	65,5269	5
14	Kab. Malang	333.189	1.895.574	927.136	3.155.899	10,5577	60,0645	5
15	Kab. Mojokerto	400.009	1.084.685	528.201	2.012.895	19,8723	53,8868	5
16	Kab. Nganjuk	237.474	1.175.872	491.542	1.904.888	12,4666	61,7292	5
17	Kab. Ngawi	138.774	1.107.606	415.905	1.662.285	8,3484	66,6315	5
18	Kab. Pacitan	89.470	833.045	308.653	1.231.167	7,2671	67,6630	5
19	Kab. Pamekasan	125.126	1.045.631	389.331	1.560.088	8,0204	67,0238	5
20	Kab. Pasuruan	372.454	1.315.926	581.394	2.269.774	16,4093	57,9761	5
21	Kab. Ponorogo	177.248	1.172.450	455.180	1.804.878	9,8205	64,9601	5
22	Kab. Probolinggo	163.832	1.126.784	475.991	1.766.607	9,2738	63,7824	5
23	Kab. Sampang	121.298	999.734	247.985	1.369.017	8,8602	73,0257	3
24	Kab. Sidoarjo	1.090.576	1.449.353	822.466	3.362.395	32,4345	43,1048	5
25	Kab. Situbondo	125.964	1.002.451	337.477	1.465.892	8,5930	68,3850	3
26	Kab. Sumenep	166.654	1.309.105	378.665	1.854.424	8,9869	70,5936	3
27	Kab. Trenggalek	124.094	1.020.820	418.944	1.563.859	7,9351	65,2757	3
28	Kab. Tuban	260.939	1.096.825	440.127	1.797.891	14,5136	61,0062	5
29	Kab. Tulungagung	213.010	1.286.442	703.717	2.203.170	9,6684	58,3905	5
30	Kota Blitar	82.436	536.977	163.393	782.806	10,5309	68,5964	5
31	Kota Kediri	128.676	971.081	419.727	1.519.484	8,4684	63,9086	5
32	Kota Madiun	111.379	593.152	202.279	906.811	12,2825	65,4108	5
33	Kota Malang	353.428	931.506	416.414	1.701.347	20,7734	54,7511	5
34	Kota Mojokerto	92.842	518.353	154.312	765.507	12,1282	67,7137	5
35	Kota Pasuruan	92.731	541.812	111.386	745.928	12,4317	72,6359	3
36	Kota Probolinggo	108.621	562.732	161.469	832.822	13,0425	67,5693	3
37	Kota Surabaya	3.520.137	1.506.797	1.489.373	6.516.307	54,0204	23,1235	5
38	Kota Batu	80.150	554.901	117.272	752.323	10,6537	73,7583	5

Lampiran 3. Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian (X1)	38	7,267	54,020	13,35545	9,018036
Ketergantungan (X2)	38	23,123	73,758	62,86211	9,427751
Akuntabilitas (Y)	38	3	5	4,47	,893
Valid N (listwise)	38				



Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,80851970
Most Extreme Differences	Absolute	,210
	Positive	,112
	Negative	-,210
Kolmogorov-Smirnov Z		1,297
Asymp. Sig. (2-tailed)		,069

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinieritas

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ketertarikan (X2), Kemandirian (X1)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kemandirian (X1)	,158	6,328
	Ketertarikan (X2)	,158	6,328

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Coefficient Correlations^a

Model		Ketertarikan (X2)	Kemandirian (X1)
1	Correlations	Ketertarikan (X2)	,918
		Kemandirian (X1)	1,000
	Covariances	Ketertarikan (X2)	,001
		Kemandirian (X1)	,001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Kemandirian (X1)	Ketergantungan (X2)
1	1	2,717	1,000	,000	,005	,000
	2	,281	3,109	,001	,117	,003
	3	,001	44,658	,999	,878	,996

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

c. Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ketergantungan (X2), Kemandirian (X1)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: |e|

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,208 ^a	,043	-,011	,263856

a. Predictors: (Constant), Ketergantungan (X2), Kemandirian (X1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,110	2	,055	,793	,460 ^a
	Residual	2,437	35	,070		
	Total	2,547	37			

a. Predictors: (Constant), Ketergantungan (X2), Kemandirian (X1)

b. Dependent Variable: |e|

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,309	,879		1,489	,146
	Kemandirian (X1)	-,012	,012	-,413	-,994	,327
	Ketergantungan (X2)	-,014	,012	-,507	-1,220	,231

a. Dependent Variable: |e|

Lampiran 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ketertarikan (X ₂), Kemampuan (X ₁)	.	Enter

- a. All requested variables entered.
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424 ^a	,179	,132	,831

- a. Predictors: (Constant), Ketertarikan (X₂), Kemampuan (X₁)

Model Summary

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	,179 ^a	3,825	2	35	,031

- a. Predictors: (Constant), Ketertarikan (X₂), Kemampuan (X₁)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,287	2	2,643	3,825	,031 ^a
	Residual	24,187	35	,691		
	Total	29,474	37			

- a. Predictors: (Constant), Ketertarikan (X₂), Kemampuan (X₁)
- b. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,796	2,770		3,897	,000
	Kemampuan (X ₁)	-,063	,038	-,633	-1,644	,109
	Ketertarikan (X ₂)	-,087	,036	-,922	-2,393	,022

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

Coefficients^a

Model		Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
1	Kemandirian (X1)	,212	-,268	-,252
	Ketergantungan (X2)	-,341	-,375	-,366

a. Dependent Variable: Akuntabilitas (Y)

